

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sejalan dengan pulihnya kegiatan perekonomian dan perkembangan kegiatan usaha di Indonesia maka perlu adanya sumber-sumber untuk penyediaan dana guna membiayai kegiatan usaha tersebut. Oleh karena pertumbuhan perekonomian atau pertumbuhan kegiatan usaha harus didukung oleh iklim investasi yang baik pula. Apabila ditinjau dari sisi yang lain yaitu sudut pandang perbankan atau lembaga keuangan yang menyediakan sumber dana maka kredit merupakan komponen sumber pendapatan yang dominan dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa lainnya dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga keuangan harus mempunyai pengendalian intern yang efektif agar kredit yang disalurkan tidak bermasalah atau macet di masa yang akan datang. Pengelolaan kredit yang baik erat kaitannya dengan dipatuhinya pengendalian intern oleh setiap orang dalam organisasi yang menjadi bagian dari pengendalian intern itu sendiri. Pengendalian intern dibutuhkan guna menjaga kekayaan atau aktiva perusahaan dari tindak kejahatan dan kecurangan. Pengendalian intern yang efektif dapat meminimalisir resiko kerugian akibat kredit bermasalah. Salah satu indikator efektifitas pengendalian intern terdapat pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Pengendalian intern juga berfungsi untuk mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan dan ketidak-telitian yang terjadi sehingga dapat menjamin keandalan pencatatan akuntansi.

Pengendalian intern yang baik akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Mulyadi (1998 : 175) unsur pengendalian intern yaitu :

1. Lingkungan pengendalian
2. Penaksiran resiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas
5. Pemantauan

Unsur-unsur pengendalian intern menjadi pertimbangan suatu organisasi dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Didalam unsur pengendalian intern juga terdapat praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap organisasi yang meliputi penggunaan formulir bernomor urut bercetak, perputaran jabatan tidak ada rangkaian jabatan satu orang atau unit organisasi, pembentukan unit organisasi yang berhak dan bertanggungjawab untuk memantau efektifitas pengendalian intern, dan pemeriksaan mendadak. Penempatan karyawan dengan kemampuan dan kompetensi yang tepat pada bagian yang benar sehingga dapat dicegah kesalahan dan kecurangan. Pemisahan tanggungjawab fungsional perlu dilakukan secara jelas dan tegas guna membagi tahapan berbagai transaksi ke dalam berbagai unit organisasi yang ada, dengan demikian terdapat internal cek diantara fungsi terkait. Sistem wewenang dan otorisasi serta prosedur pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian pengendalian intern dapat menjaga dihasilkannya laporan keuangan yang dapat dipercaya. Karena pentingnya pengendalian intern maka perlu kesadaran anggota organisasi untuk

mematuhi dan melaksanakan pengendalian intern yang telah ditetapkan. Untuk menjaga dipatuhinya pengendalian intern suatu organisasi maka diperlukan pengujian kepatuhan, dimaksudkan untuk menjaga proses pengendalian intern telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan memastikan tingkat efektifitas pengendalian intern dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian intern dalam proses pemeriksaan akuntansi merupakan hal yang penting diperhatikan oleh auditor agar proses pemeriksaan laporan keuangan berjalan dengan efektif dan efisien. Adanya keterbatasan waktu dan biaya maka auditor tidak mungkin melakukan audit secara menyeluruh terhadap bukti yang berkaitan dengan obyek atau tujuan auditnya. Pengujian pengendalian intern dengan menggunakan sampel 100 % sangat sulit dan banyak memerlukan waktu dan biaya. Bukti-bukti transaksi merupakan alat atau media bagi auditor untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan tingkat pengendalian yang ada. Auditor mengevaluasi secara uji petik (sampel) atas bukti yang kompeten yang mencerminkan jumlah populasi. Sesuai dengan standar auditing yang berlaku umum (SABU) penentuan dan pengambilan jumlah sampel yang harus diuji dapat dilakukan berdasarkan kebijakan auditor (*judgement sampling*) atau non statistical. Penentuan dan pengambilan sampel dari populasi diharapkan dapat memperoleh bukti-bukti yang representatif atau mencerminkan keadaan populasi. Pada metode penentuan sampel nonstatistik, penentuan besaran sampel dan evaluasi hasil-hasilnya didasarkan pada kriteria yang subyektif dan pengalaman auditor, sehingga kemungkinan penggunaan sampel terlalu banyak atau sebaliknya yang tidak disadari oleh auditor. Pengambilan sampel berdasarkan

perhitungan secara statistik (*statistical sampling*) dapat memberikan manfaat bagi auditor dalam perancangan suatu sampel yang efisien, pengukuran cukup tidaknya bukti yang telah diperoleh, dan pengevaluasian hasil sampel. Penggunaan teknik statistik ada dua yaitu :

1. *Attribute sampling* digunakan untuk pengujian pengendalian merupakan perkiraan tingkat penyimpangan antara pelaksanaan dengan pengendalian yang sudah ditetapkan.

2. *Variable sampling* digunakan untuk pengujian substantif merupakan perkiraan total jumlah rupiah suatu populasi atau jumlah rupiah kesalahan dalam suatu populasi..

Pengendalian intern merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang mempunyai resiko bawaan cukup tinggi. Oleh karena perlu evaluasi pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang dengan teknik *attribute sampling*.

1.2 Pokok Permasalahan

Pada proses pemeriksaan akuntansi terdapat keterbatasan yang melekat atau resiko bawaan dalam pengendalian intern, diantaranya faktor manusia yang merupakan subjek pada proses pemberian kredit pada lembaga keuangan. Menurunnya tingkat efektifitas pengendalian intern dapat disebabkan karena keterbatasan manusia, tidak teliti, kelelahan, salah interpretasi dengan pimpinan,

dan kolusi. Pengendalian intern merupakan alat deteksi pertama proses pemeriksaan akuntansi oleh auditor sebagai indikator bebasnya laporan keuangan dari resiko salah saji dan kecurangan. Pengendalian intern prosedur pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang mempunyai resiko penyelewangan cukup tinggi. Pengendalian intern proses pemberian kredit pada PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang perlu dievaluasi penerapannya untuk menentukan penyimpangan dan tingkat kepatuhan pengendalian intern. Apakah pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang telah efektif?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan dokumen kredit sektor umum periode 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dengan menggunakan *fixed sample size attribute sampling*. Dokumen yang terdapat pada prosedur pemberian kredit sektor umum yaitu :

- 1) Formulir permohonan kredit.
- 2) Surat perjanjian kredit (SPK).
- 3) Kuitansi penerimaan uang.
- 4) Kartu Angsuran.
- 5) Slip Tanda Penerimaan
- 6) Bukti setoran rekening notaris.

Dengan memperhatikan keterbatasan penulis serta waktu yang diberikan oleh pihak PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang maka pengujian dokumen sampel hanya dilakukan pada

1. Formulir permohonan kredit.
2. Surat perjanjian kredit (SPK).
3. Kuitansi penerimaan uang.

1.4 Tujuan dan manfaat penelitian

1. Meneliti penyelenggaraan pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang apakah sudah sesuai dengan tujuan pengendalian intern.
2. Memberikan saran dan perbaikan untuk pertimbangan PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang dalam proses pemberian kredit.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia

1.5 Metode penelitian

1. Data yang diperlukan
 - a. Data umum
 - Sejarah perusahaan
 - b. Data khusus
 - Struktur Organisasi perusahaan
 - Proses pemberian kredit

- Formulir yang digunakan dalam sistem pemberian dan pengembalian kredit
- Bagan alir proses pemberian kredit

2. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pimpinan PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang dan bagian kredit untuk mengetahui data tentang sejarah, sistem organisasi, proses pemberian kredit, formulir yang digunakan dalam proses pemberian kredit PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang.

b. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh bagian kredit.

c. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan bagian penagihan tentang proses pemberian kredit yang dihubungkan dengan pengendalian intern.

1.6 Metode analisa data

Metode yang digunakan dalam mengevaluasi pengendalian intern proses pemberian kredit PD. BPR Bank Bapas 69 Magelang yaitu dengan teknik *fixed sample size attribute sampling*.

Tahap analisa yang dilakukan :

1. Penentuan attribute yang akan diperiksa untuk menguji efektifitas pada dokumen antara lain :
 - 1) Surat Permohonan Kredit, attribute yang akan diuji :
 - a. Otorisasi pejabat yang berwenang : Tanda tangan kepala bagian kredit.
 - b. Dokumen pendukung : fotokopi identitas nasabah.
 - 2) Surat Perjanjian Kredit, attribute yang akan diuji :
 - a. Otorisasi : Tanda tangan direksi
 - b. Dokumen pendukung : Hasil analisa kredit
 - c. Otorisasi : Tanda tangan nasabah diatas materai
 - 3) Kuitansi Penerimaan Uang, attribute yang akan diuji
 - a. Otorisasi : Tanda tangan kasir pada kuitansi penerimaan uang
 - b. Verifikasi bagian kredit pada kuitansi penerimaan uang
 - c. Dokumen pendukung : Slip rincian kredit
2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.
3. Penentuan besarnya sampel :
 - a. Menentukan tingkat keandalan (*reability level*) atau *convidence level* (R%)
 - b. Penaksiran terjadinya attribute dalam populasi
 - c. Menentukan batas ketepatan atas yang diinginkan atau DUPL (*Desired Upper Precision Limit*).
 - d. Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel yang tersedia, disusun menurut R%.

4. Pemeriksaan terhadap attribute anggota sampel yang dipilih dengan cara membandingkan DUPL dan AUPL (*Achieved Upper Precision Limit*)
5. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkreditan

2.1.1 Pengertian

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*Crede*” yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan akan kebenaran.¹ Dalam praktek kehidupan sehari-hari pengertian tersebut berkembang lebih luas. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Dirumuskan dalam bab I, pasal 1, 2 Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 yaitu

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan”.

Dasar kredit dalam kitab suci Al Quran surat AL Baqarah ayat 283 :

“Apabila kamu dalam perjalanan dan tidak ada orang yang memuliskan (utang), maka hendaklah dengan rungguhan yang diterima ketika itu”.

Hadist Rasul diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah.

¹ Teguh Pudjo Mulyono Drs Akt, Perkreditan bagi Bank Komersil, hal 6

Dari Anas katanya : “ *Telah merungguhkan Rasulullah saw, baju besi beliau kepada seseorang Yahudi di Madinah , sewaktu beliau mengutang sya’ir (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah (keluarga) beliau*”. (Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Menurut pasal 1 undang-undang perbankan tahun 1992, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari perumusan diatas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1) Adanya suatu penyerahan uang atau dapat juga barang yang dapat menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan memberi pinjaman ini bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yang berupa bunga sebagai pendapatan bagi bank yang bersangkutan.

2) Dari proses kredit itu telah didasarkan pada suatu perjanjian yang saling mempercayai keduabelah pihak akan mematuhi kewajibannya masing-masing.

3) Dalam pemberian kredit ini terkandung kesepakatan pelunasan hutang dan bunga akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama.

2.1.2 Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh lembaga redit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Suatu lembaga keuangan akan memberikan kredit apabila lembaga tersebut benar-benar yakin

bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang akan diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur yang terdapat dalam kredit yaitu² :

1) Kepercayaan adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2) Waktu adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) *Degree of risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.

4) Prestasi atau objek kredit, berupa barang atau jasa namun karena kehidupan modern sekarang didasarkan pada nilai tukar yang lebih mudah yaitu uang maka transaksi-transaksi dalam praktek kredit yang sering kita jumpai menyangkut uang.

2.1.3 Tujuan Kredit

Di negara-negara liberal tujuan kredit didasarakn kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut negara-negara bersangkutan. Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika penerima kredit mampu dan mau mengembalikan kredit yang diterimanya. Dari faktor kemampuan dan kemauan

² Thomas Suyanto Drs dkk, Dasar-dasar perkreditan, ed 4, hal 14

tersebut tercermin unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*). Unsur keamanan yang dimaksud adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat terwujud. Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan atau bank yang mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah³

- 1) Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

2.1.4 Fungsi Kredit

Bank memegang peranan yang penting dalam kehidupan perekonomian modern karena itu oleh karena itu bank selalu dilibatkan dalam menentukan kebijakan di bidang moneter, pengewasan devisa dan lain-lain. Usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan kredit yang diberikan bank mempunyai pengaruh yang sangat luas bagi kehidupan khususnya bidang ekonomi. Fungsi kredit dalam bidang ekonomi antara lain sebagai berikut⁴ :

- 1) Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang

Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan produksi atau

³ Thomas Suyanto Drs dkk, Dasar-dasar perkreditian, ed 4, hal 15

⁴ Thomas Suyanto Drs dkk, Dasar-dasar perkreditian, ed 4, hal 16

meningkakan usahanya. Para pemilik modal juga dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan, kemudia disalurka kepada pengusaha untuk kepentingan usahanya.

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang

Kredit uang yang disaurkan melalui rekenng giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga pembeyaran yang dilakukan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Penarikan kredit perbankan secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga arus lalu-lintas uang berkembang pula.

3) Kredit dapat meningkatkandaya guna dan peredaran barang

Pengusaha yang mendapatkan kredit dapat menjalankan usahanya yaitu memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga meningkatkan daya guna barang tersebut. Disamping itu kredit dapat juga meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang dari tempat yang satu kemudian menjualnya ke tempat yang lain.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Misal pada pertengahan tahun 1997, untuk menekan laju inflasi pemerintah menerapkan kebijakan uang ketat (*tigh money policy*) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif.tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bantuan kredit yang diberikan oleh bank dapat mengatasi kekurangmampuan pengusaha di bidang permodalan sehingga para pengusaha dapat meningkatkan usahanya.

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Pemberian kredit oleh bank kepada pengusaha dapat memperluas usaha dan mendirikan proyek-proyek baru. Perluasan usaha membutuhkan tenaga kerja, dengan tertampungnya tenaga kerja maka pemerataan pendapatan akan meningkat.

6) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara-negara maju dapat memberikan bantuan kredit kepada negara berkembang melalui jasa lembaga keuangan, pemberian bantuan kredit dapat meningkatkan hubungan kedua negara.

2.1.5 Jenis Kredit⁵

Dilihat dari jenis penggunaannya kredit dibedakan menjadi :

1. Kredit modal

Kredit modal kerja adalah kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan.

2. Kredit investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru.

⁵ Tjukria P Tawaf, Audit Intern Bank , hal 248

3. Kredit lainnya

Kredit lainnya merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah selain yang disebutkan diatas misalnya kredit pemilikan rumah, kredit profesi dan lain sebagainya.

Dalam arti luas, kredit dapat digolongkan sebagai berikut :

A. Fasilitas Langsung

1. Kredit yang diberikan

a. Kredit Rekening Koran

Fasilitas yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menarik dana melalui rekening sepanjang tidak melampaui plafon tertentu. Media penarikannya adalah dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Mekanisme tersebut sering juga disebut *overdraft facility*.

b. Revolving

Fasilitas yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menarik kredit yang dibutuhkan sampai sejumlah plafon yang disetujui. Media penarikan melalui Promisory Note (*Promnote*) dengan kelipatan serta jangka waktu tertentu dan dapat ditarik dan disetor kembali berulang-ulang.

c. Kredit dengan Angsuran (*Installment*)

Pemberian sejumlah kredit dengan pengembalian melauai ansuran yang ditetapkan sesuai perjanjian. Periode angsuran dapat berbentuk bulanan, dua bulanan, triwulan, atau enam bulanan.

d. *Trust Receipt Facility*

Pemberian fasilitas kepada debitur untuk membayar tegihan dari *Negotiating Bank* atas L/C yang dibuka. Barang yang dibeli melalui pembukaan L/C tersebut bukan merupakan barang modal melainkan bahan baku atau barang kebutuhan produksi lainnya. Sesuai dengan sifat penggunaannya, fasilitas ini sering disebut juga dengan (*Post Import Financing*).

2. Uang Muka L/C

Pembayaran tagihan dari *Negotiating Bank* atas L/C yang dibuka sebelum tagihan tersebut dilunasi oleh importir. Belum dilunasinya pembayaran ini dapat terjadi karena dokumen impor belum datang, dana belum tersedia atau sebab-sebab lainnya.

3. *Overdraft/ Cerukan*

Ovedraft terjadi apabila penarikan dana melampaui kredit atau saldo efektif rekening.

4. Cek Warkat Dibeli

Pembelian warkat atau surat berharga (rupiah atau valuta asing) yang dilakukan berdasarkan *Underlying Transaction* dan dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA). Dalam pembelian warkat ini bank memperhitungkan unsur bunga untuk memperoleh pendapatan.

B. Fasilitas Tidak Langsung

1. Kewajiban Bank Garansi

Surat yang diterbitkan Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila yang yang dijain melakukan wanprestasi.

2. Out standing L/C Berjalan

Bagian dari L/C yang dikeluarkan Bank dan belum jatuh tempo, namun belum direalisasi oleh pihak penerima L/C.

3. Akseptasi Wesel Berjangka

Pengakuan Bank untuk membayar sejumlah dana kepada pihak lain pada suatu tanggal tertentu.

2.1.6 Prosedur Pemberian Kredit secara umum⁶

1) Permohonan nasabah

Pada prosedur ini nasabah mengajukan permohonan dan bank mencari informasi nasabah dan bisnisnya dari berbagai sumber, termasuk informasi dari bank ke bank. Informasi yang dihasilkan digunakan sebagai sumber data dalam proses analisis kredit.

2) Persiapan analisis

Nasabah harus menjadi subyek hukum dengan memilih akte-akte pendirian badan usaha, NPWP, izin-izin usaha yang berlaku baik yang umum maupun khusus bidang usahanya, laporan keuangan, dan aktivitas usaha beserta penjelasannya.

3) Aspek-aspek dalam analisis

⁶ Tjukria P Tawaf, Audit Intern Bank , hal 267

Tujuannya untuk memperoleh keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan mencapai tujuan dan nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank harus menerapkan prinsip 6C mengingat selalu ada resiko tidak kembalinya kredit. Prinsip 6C yang dimaksud adalah⁷ :

1) **Character** yaitu adanya keyakinan dari pihak Bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat- sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) **Capacity** yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari Bank.

3) **Capital** yaitu jumlah modal/ dana sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Besar kecilnya capital dapat diindikasikan dari neraca perusahaan yaitu pada komponen "*Owner Equity*", laba ditahan dan lain-ain.

4) **Collateral** yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/ debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya.

5) **Condition of Economy** yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat

⁷ Teguh Pudjo Mulyono Drs Akt, Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial, hal 11

maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6) *Constraint* yaitu batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan kegiatan bisnis di suatu tempat. Walaupun semua prinsip 5C diatas semua cukup baik atau memungkinkan, sebagai contoh seorang peternak babi didaerah pemukiman muslim, walaupun prinsip 5C dapat memenuhi syarat tetapi perusahaan tersebut terdapat hambatan yang tidak bisa ditawar.

Setiap analisis kredit harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Independen dan obyektif.
- b. Mencakup analisis kualitatif dan kuantitatif.
- c. Adanya penetapan sumber pelunasan.
- d. Adanya penetapan struktur fasilitas kredit.
- e. Adanya analisis jaminan dan agunan
- f. Adanya analisis resiko.

4) Analisa resiko

Bank harus memperoleh kejelasan mengenai bentuk resiko yang harus dihadapi sehubungan dengan kredit nasabah agar bisa memperhitungkan bagaimana mengatasi resiko itu

5) Perhitungan kebutuhan kredit

Jumlah kebutuhan kredit nasabah, berapa kebutuhan pembiayaan nasabah dan berapa yang dibiayai nasabah. Perhitungan dilakukan dengan metode yang diterapkan bank.

6) Penggunaan formulir analisis kredit

Untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas, penggunaan formulir standar merupakan suatu keharusan. Formulir analisis kredit digunakan sebagai perhitungan dan bukti pembayaran kredit bagi nasabah.

7) Tahap kerja

Tahap kerja adalah alur langkah yang harus dipenuhi dalam kegiatan pengelolaan kredit.

2.2 Pengendalian Intern

2.2.1 Pengertian

Pengendalian Intern (*Internal Control*) adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan⁸ dalam kategori berikut :

- 1) Keandalan laporan keuangan.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- 3) Efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan Pengendalian Intern⁹

1. Menjaga kekayaan organisasi

⁸ Walter G Kell, William C. Boyton, Modern Auditing 5th ed, hal 373

⁹ Mulyadi Drs. Akt. Msc. Sistem Akuntansi ed 3. hal 166

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.2.2 Unsur Pengendalian Intern¹⁰

Pengendalian terdiri dari lima komponen yang saling terkait yaitu :

2.2.2.1 Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan landasan bagi komponen-komponen pengendalian lainnya, dengan menciptakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian dalam sebuah perusahaan terdiri dari berbagai faktor antara lain :

1. Integritas dan nilai-nilai etika

Untuk menekankan pentingnya integritas dan nilai-nilai etika diantara para personil suatu organisasi, manajemen puncak harus :

- 1) Menciptakan iklim dengan memberi contoh yaitu dengan menunjukkan integritas dan perilaku dengan standar etika yang tinggi.
- 2) Mengkomunikasikan kepada semua karyawan secara lisan dan melalui kebijakannya bahwa semua karyawan mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan semua pelanggaran yang diketahui atau dicurigainya kepada atasannya.
- 3) Memberi pedoman moral kepada karyawan yang mempunyai latar belakang moral buruk.

¹⁰ Al Haryono Jusup Drs MBA Ak, Auditing I (Pengauditan), hal 257

4) Mengurangi atau menghilangkan dorongan dan godaan yang bisa membua orang menjadi tidak jujur, melanggar hukum, dan bertindak tidak etis.

2. Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi diperlukan agar karyawan pada setiap jenjang organisasi memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya secara efektif. Untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan publik yang besar, manajemen puncak dan karyawan bagian akuntansi dituntut untuk memiliki kompetensi lebih tinggi bila dibandingkan dengan persyaratan kompetensi pada perusahaan yang lebih kecil.

3. Dewan dan komite audit

Dewan komisaris dan komite audit merupakan faktor yang paling mempengaruhi dalam lingkungan pengendalian, yaitu bagaimana mereka melakukan tanggungjawab pengawasan dan independensi dari manajemen yang berkaitan dengan proporsi anggota dewan yang berasal dari luar. Komite audit yang beranggotakan dari luar akan memberikan sumbangan besar bagi perusahaan dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan melalui pengawasan atas pelaporan keuangan dan mendorong independensi auditor ekstern.

4. Falsafah manajemen dan gaya operasi

Falsafah manajemen yang terbentuk dari karakteristik dan gaya operasi yang berbeda mempunyai dampak terhadap lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut meliputi apa yang dilakukan atau dimiliki manajemen dalam :

1) Pendekatan untuk mengambil dan memonitor resiko bisnis.

- 2) Penekanan pada kontak-kontak informal langsung dengan manajer kunci atau pada sistem kebijakan tertulis yang formal, indikator-indikator kinerja dan laporan penyimpangan.
- 3) Kebiasaan dan tindakan terhadap pelaporan keuangan.
- 4) Pemilihan prinsip akuntansi alternatif yang tersedia secara konservatif atau agresif.
- 5) Kehati-hatian dalam mengembangkan taksiran-taksiran akuntansi.
- 6) Kebiasaan dalam mengolah informasi dan fungsi akuntansi serta personalia.

5. Struktur organisasi

Struktur organisasi memberikan kerangka menyeluruh untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pemantauan aktivitas perusahaan. Struktur organisasi dituangkan dalam bentuk bagan organisasi yang secara tepat menggambarkan hubungan kewenangan dan pelaporan. Auditor perlu untuk memahami hubungan tersebut agar dapat menilai lingkungan pengendalian pada perusahaan klien dan bagaimana lingkungan tersebut berdampak pada efektifitas kebijakan dan prosedur pengendalian.

6. Penetapan kewenangan dan tanggung jawab.

Perumusan wewenang dan tanggung jawab menyangkut tentang bagaimana dan kepada siapa kewenangan dan tanggung jawab akan membuat setiap individu mengetahui bagaimana tindakannya berkaitan dengan pihak lain dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, dan untuk hal apa masing-masing individu harus bertanggungjawab.

7. Kebijakan dan praktik di bidang sumberdaya manusia

Salah satu konsep dasar adalah pengendalian intern dipengaruhi dan dilaksanakan oleh manusia oleh karena itu efektif tidaknya pengendalian intern sangat bergantung pada kebijakan dan praktik tentang sumberdaya manusia yang bersangkutan. Sumberdaya manusia menentukan apakah personil perusahaan memiliki tingkat integritas yang diharapkan, nilai-nilai etika dan kompetensi.

2.2.2.2 Perhitungan Resiko (*Risk Assessment*)

Perhitungan resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis dan pengelolaan resiko suatu perusahaan berkenaan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Perhitungan resiko oleh manajemen pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama dengan resiko bawaan pada proses audit, keduanya berhadapan dengan masalah hubungan antara resiko dengan asersi-asersi laporan keuangan tertentu serta aktivitas yang bersangkutan dengan pencatatan, pengolahan, peringkasan dan pelaporan data keuangan. Perbedaannya adalah tujuan manajemen menentukan bagaimana mengelola resiko yang telah diidentifikasi sedangkan tujuan auditor adalah mengevaluasi kemungkinan adanya salah saji material dalam laporan keuangan. Perhitungan resiko oleh manajemen harus mencakup pertimbangan khusus untuk resiko yang bisa muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi seperti adanya perubahan bidang baru dengan transaksi-transaksi baru yang prosedur akuntansinya belum dipahami, perubahan standar akuntansi, perubahan undang-undang atau peraturan, revisi atas sistem atau digunakannya teknologi baru dalam pengolahan informasi dan fungsi pelaporan

menjadi kewalahan dan perubahan personil yang terlibat dalam pengolahan informasi dan fungsi pelaporan.

2.2.2.3 Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi terdiri metoda dan catatan-catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Fokus utama dari sistem akuntansi adalah transaksi, transaksi terdiri dari pertuaran aktiva dan jasa antara suatu entitas dengan pihak luar dan juga pemindahan atau penggunaan aktiva kedalam entitas. Transaksi yang ditangani dengan suatu cara agar dapat mencegah terjadinya salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen, oleh karena itu sistem akuntansi yang efektif adalah mengidentifikasi dan mencatat hanya transaksi yang *valid* dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi keberadaan atau keterjadian). Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid dari entitas yang terjadi dalam periode berjalan (asersi kelengkapan). Memastikan bahwa aktiva dan kewajiban yang tercatat merupakan hasil dari transaksi yang memberikan entitas hak untuk atau kewajiban untuk item-item tersebut (asersi hak dan kewajiban). Mengukur nilai transaksi dalam suatu cara yang mengijinkan pencatatan nilai moneter transaksi secara tepat dalam laporan keuangan (asersi penilaian atau alokasi). Memperoleh rincian yang mencukupi dari semua transaksi untuk memungkinkan penyajian secara tepat dalam laporan keuangan, termasuk

pengklasifikasian yang tepat dan pengungkapan yang diperlukan (asersi penyajian dan pengungkapan).

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggungjawab masing-masing individu berkenaan dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan. Komunikasi berarti meyakinkan bahwa personil yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan mengerti bagaimana kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain, baik orang dari dalam maupun dari luar organisasi

2.2.2.4 Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa perintah manajemen telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko telah diambil untuk pencapaian tujuan perusahaan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara, salah satu cara antara lain :

1. Pemisahan tugas (*segregation of duties*) melibatkan pemastian bahwa individu tidak melaksanakan tugas yang memungkinkan individu melakukan kekeliruan atau kecurangan dan kemudian berada pada posisi untuk menutupinya dalam pelaksanaan tugas normalnya. Pemisahan tugas yang baik juga melibatkan perbandingan akuntabilitas yang tercatat dengan aktiva di tangan.

2. Pengendalian pemrosesan informasi (*information processing controls*) mengacu pada resiko yang berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan dan akurasi akuntansi.
 - a. Pengendalian umum (*general control*) yang berhubungan dengan pengoperasian pusat data secara keseluruhan yang antara lain meliputi pengorganisasian pusat data, perangkat keras dan penerapan sistem perangkat lunak beserta pemeliharaannya, termasuk juga prosedur *backup*
 - b. Pengendalian aplikasi (*application control*) yang berhubungan dengan pengolahan jenis transaksi tertentu, seperti pembuatan faktur untuk pelanggan, pembayaran kepada pemasok, dan penyiapan daftar gaji.
3. Pengendalian fisik berhubungan dengan pembatasan dua jenis akses terhadap aktiva dan catatan-catatan penting, yaitu akses fisik secara langsung dan akses tidak langsung melalui pembuatan atau pengolahan dokumen, seperti order penjualan dan voucher pengeluaran yang memberi persetujuan untuk menggunakan atau menjual aktiva. Pengendalian ini terutama berhubungan dengan alat-alat dan aturan pengamanan atas aktiva, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan program komputer atau file.
4. *Review* kinerja bertujuan untuk menilai kinerja. Dengan menghubungkan data menurut laporan dengan harapan manajemen sendiri, maka manajemen akan dapat mendeteksi tempat-tempat mana saja yang memiliki resiko salah saji. Salah saji semacam ini menyangkut asersi keberadaan dan kejadian, kelengkapan, penilaian atau pengalokasian, atau penyajian dan pengungkapan.

2.2.2.5 Pemonitoran (*Monitoring*) adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang masa. Hal itu menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu, untuk menentukan bahwa pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dan telah dilakukan modifikasi yang diperlukan karena adanya perubahan-perubahan kondisi.

2.2.3 Arti Penting Pengendalian Intern¹¹

Arti penting dari pengendalian intern bagi manajemen dan akuntan publik telah diakui oleh berbagai literatur professional selama bertahun-tahun. Sebuah publikasi dari AICPA pada tahun 1947 berjudul *Internal Control*, menyebutkan faktor-faktor pendorong semakin luasnya pengakuan pentingnya pengendalian intern sebagai berikut :

1. Lingkup dan besarnya perusahaan yang kompleks dan meluas sehingga manajemen tidak mungkin lagi memimpin perusahaan secara langsung, manajemen harus mengandalkan pada sejumlah laporan dan analisis agar dapat mengendalikan perusahaan secara efektif.
2. Pengecekan dan review yang melekat pada suatu sistem pengendalian intern yang baik dapat melindungi perusahaan dari kelemahan manusiawi dan mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan dan ketidakberesan.
3. Pengendalian intern yang berlaku di perusahaan klien sangat bermanfaat untuk membatasi lingkup audit, ditinjau dari segi auditing. Dengan adanya

¹¹ Al Haryono Jusup Drs MBA Ak, Auditing 1 (Pengauditan), hal 249

keterbatasan waktu dan pertimbangan efektifitas biaya, pada umumnya tidaklah praktis bagi auditor untuk melakukan audit tanpa mengandalkan pada pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien.

2.2.4 Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit

2.2.4.1 Pokok - pokok utama dalam pengendalian kredit adalah¹²

1) Harus ada sistem pengendalian intern yang baik dalam arti ada pemisahan fungsi antara pejabat yang meyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit dan taksasi agunan.

2) Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang telah disetujui direksi. Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan antara lain :

1. Ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang
2. Ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum)
3. Ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan
4. Informasi keuangan yang harus diperoleh dari debitur
5. Konsentrasi kredit
6. Pengertian kredit bermasalah serta penangannya.

3) Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit, artinya para pengelola kredit bank harus mempunyai pengetahuan yang cukup seta ketrampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan bank intern, ketentuan Bank Indonesia maupun dalam hal masalah dengan nasabahnya.

¹² Tjukria P Tawaf, Audit Intern Bank , hal 270

4) Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Inti dari pengendalian adalah tindakan untuk mengarahkan kegiatan termasuk koreksi atas kekurangan yang ada serta penyesuaian kegiatan agar selaras dengan prosedur atau tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pengendalian khususnya perkreditan, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Secara rinci berdasarkan proses kredit berjalan unsur pengendalian kredit adalah sebagai berikut¹³ :

A. Pada Saat Pemberian Kredit

1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Account Officer(A/O) atau Relation Officer(R/O) dan orang-orang yang menangani proses permohonan kredit harus mempunyai syarat-syarat serta data kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah, antara lain

- 1) Mengetahui jenis kebutuhan pembiayaan yang diperlukan nasabah.
- 2) Mengetahui jenis kredit bank yang cocok untuk pembiayaan nasabah tersebut.
- 3) Mengetahui syarat-syarat kreditnya serta data yang harus dipenuhi nasabah berkaitan dengan pembiayaan tersebut.

¹³ Tjukria P Tawaf, Audit Intern Bank , hal 275

4) Mengetahui prosedur teknis proses kredit.

2. Pemisahan tugas yang memadai

Pemisahan tugas antara penilai atau petugas taksasi jaminan dengan petugas yang melakukan analisis harus ada. Artinya taksasi jaminan

3. Prosedur otorisasi yang wajar

Prosedur otorisasi merupakan aspek penting dalam pengendalian intern. dalam hal ini adalah dipenuhinya persyaratan pelaksanaan proses sesuai yang ditetapkan dalam pedoman kredit baik kebijakan maupun prosedurnya. Misalnya proses kredit bisa dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan diserahkan ke bank.

4. Dokumen dan catatan yang cukup

Dokumen dan catatan administrasi yang dibutuhkan meliputi antara lain : data ekonomis, keuangan, teknis, yuridis dan sebagainya, serta didukung oleh bukti-bukti yang sah.

5. Pemeriksaan fisik dan catatan

Pemeriksaan fisik aktiva dan catatan dalam proses permohonan kredit yang terpenting adalah pemeriksaan ditempat (*on the spot*) sebelum proses kredit selanjutnya dilakukan, meliputi :

- 1) Pemeriksaan kegiatan usaha nasabah, termasuk kantor-kantornya dan pabrik/ lokasi produksi.
- 2) Pemeriksaan jaminan kreditnya meliputi pemeriksaan fisik (*on the spot*), lokasi, taksasi nilai beli, nilai jual kembali dan nilai buku). Data

yang berupa catatan-catatan tentang kondisi nasabah untuk proses kredit selanjutnya didasarkan pada kondisi obyektif yang sebenarnya.

B. Pada Saat Proses Analisis Kredit

1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

1) *Relationship Officer* (R/O) yang melakukan analisis terhadap data yang sudah disiapkan harus mempunyai pengetahuan yang bersangkutan yang memadai.

2) *Relationship Officer* (R/O) tersebut harus mempunyai sikap mental yang jujur, obyektif, dan dapat dipercaya.

2. Pemisahan tugas yang memadai

Harus ada pemisahan tugas yang dibuktikan dengan keputusan kredit dibuat atas dasar analisis dan diuji kembali dalam rapat Komite Kredit.

3. Prosedur otorisasi yang wajar

Prosedur otorisasi dalam proses analisis kredit yang menyangkut aspek pengendalian terutama menyangkut otorisasi keputusan atas kredit harus dilakukan oleh yang berwenang (Komite Kredit) berdasarkan tingkatannya. Batasan dan wewenang dari Komite Kredit harus jelas dan tegas agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang.

4. Dokumen dan catatan yang cukup

Data yang dijadikan dasar untuk informasi, analisis dan kepatuhan kredit bank harus terkeakuratan, ketepatan, kebenaran, dan kelengkapannya sehingga *valid* untuk dijadikan keputusan. Pengujian validitas data perlu diyakinkan kebenarannya apakah telah dilakukan oleh petugas yang berwenang.

5. Pemeriksaan fisik dan catatan

Analisis kredit yang sangat memperhatikan hasil pemeriksaan di tempat yang paling mutakhir, baik keadaan usaha nasabah maupun kondisi jaminannya.

C. Pada Saat Penarikan Kredit

1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

Petugas bank yang menangani penarikan kredit harus mempunyai :

- 1) Pengetahuan yuridis baik mengenai perjanjian, pengikatan dan penguasaan jaminan.
- 2) Penguasaan masalah yang bersangkutan dengan asuransi baik asuransi kredit maupun asuransi barang jaminan.
- 3) Pengetahuan yang cukup tentang sumber dana kredit baik dari intern bank atau likuiditas bank lain maupun likuiditas Bank Indonesia sehingga terjamin penyediaan dana dan realisasi penarikannya.
- 4) Pengetahuan yang cukup tentang mekanisme bank teknis dalam kaitannya dengan penarikan kredit nasabah termasuk didalamnya pembebanan biaya kepada nasabah misalnya provisi, materai atau biaya yang lainnya.
- 5) Mental yang baik, artinya tidak mempersulit nasabah untuk tujuan-tujuan tertentu.

2. Pemisahan tugas yang memadai

Aspek pengendalian dalam proses penarikan kredit yang penting adalah pihak yang memberikan persetujuan atas penarikan kredit berbeda dengan petugas bank yang melaksanakannya. Artinya proses persetujuan tersebut telah melalui

penelitian bahwa syarat-syarat disposisi telah terpenuhi oleh nasabah. Dengan demikian proses ini melalui langkah petugas bank yang membuat transaksi, kemudian petugas bank yang melakukan pemeriksaan kebenaran datanya serta petugas bank yang memberi persetujuan atas transaksi tersebut (*maker, checker, approval*).

3. Prosedur otorisasi yang wajar

Hanya pejabat yang berwenang yang bisa melakukan otorisasi dalam penarikan kredit nasabah. Untuk itu perlu dilihat cara apakah pengaturan dan pelaksanaannya untuk menilai apakah tepat atau tidak. Misalnya dalam hal penarikan dengan cek oleh nasabah atas kreditnya, apakah ada koordinasi antara petugas *Teller Customer Service* dengan *Relation Officer* yang bersangkutan? Bagaimana pengaturan hubungan kedua unit kerja bank tersebut?

4. Dokumen dan catatan yang cukup

Bank harus meneliti apakah catatan yang ada sesuai dengan dokumentasinya, terutama menyangkut :

- 1) Kelengkapan standar dari Perjanjian Kredit beserta lampiran-lampirannya, pengisiannya harus sama dengan Keputusan dari Komite Kredit.
- 2) Kelengkapan standar pengikatan jaminan serta penguasaan bukti pemilikannya.
- 3) Kelengkapan standar registrasi dalam administrasi bank atas semua transaksi nasabah.

5. Pemeriksaan fisik dan catatan

Petugas bank (*Relationship Officer*) harus yakin bahwa penarikan kredit yang dilakukan nasabah memang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis sesuai dengan yang ditetapkan bank dengan memperhatikan kebutuhan keuangan nasabah.

D. Pada Saat Proses Pemantauan Kredit

1. Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.

- 1) *Relationship Officer* secara dini harus selalu mengetahui segenap persoalan yang dihadapi nasabahnya. Pada kesempatan pertama seharusnya *Relationship Officer* mengetahui informasi itu, baik dari sumber transaksi intern di bank ataupun informasi lain dari luar bank termasuk dari media masa. *Relationship Officer* harus mampu mengembangkan pemantauannya.
- 2) *Relationship Officer* harus mampu memahami laporan-laporan keadaan usaha nasabah serta mampu menganalisisnya.
- 3) *Relationship Officer* harus mempunyai inisiatif untuk menggali persoalan yang mungkin ada di dalam usaha nasabah, baik dari laporan yang ada maupun informasi lainnya.

2. Pemisahan tugas yang memadai

Petugas bank yang mengelola rekening (*Customer Service*) aktif memberi informasi kepada *Relationship Office* atas terjadinya pergerakan rekening nasabah terutama jika pergerakan rekening kredit yang diberikan diluar kewajaran.

Relationship Officer juga harus aktif melakukan komunikasi dengan *Customer Service* untuk selalu dapat mengetahui kondisi rekening nasabah.

3. Prosedur otorisasi yang wajar

Proses pemantauan pemimpin cabang atau *Relationship Officer* dalam memberi catatan atau disposisi baik pada laporan-laporan atau lewat surat menyurat lainnya dari atau ke nasabah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya apabila terjadi penikaran jaminan, *Relationship Officer* harus mengerti masalahnya secara yuridis dan kepentingan bank tetap menjadi prioritas utama.

4. Dokumen dan catatan yang cukup

Terpeliharanya dokumentasi kredit dan file kredit nasabah merupakan syarat penting dari pengendalian demikian juga data yang menyangkut administrasi kredit lainnya, maka harus ada jaminan bahwa :

- 1) Pendapatan bank (bunga, provisi dan lain-lain) harus selalu terpantau dengan baik.
- 2) Kewajiban nasabah (angsuran) selalu terpantau dengan baik.
- 3) Bila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diambil langkah perbaikan atau koreksi.

5. Pemeriksaan fisik dan catatan

- 1) Selama masa pemantauan ada kewajiban dari *Relationship Officer* untuk selalu memelihara komunikasi dengan nasabah, antara lain dilakukan dengan melakukan kunjungan atau inspeksi ke lokasi usaha

nasabah baik untuk meninjau perkembangan usaha maupun melihat kondisi stok dan sebagainya.

- 2) Hasil peninjauan ini perlu direview dengan laporan yang disampaikan nasabah ke bank untuk meyakinkan kebenaran data selama ini.

6. Pemeriksaan pekerjaan secara independen

Salah satu aspek dari pelaksanaan pengendalian yang baik adalah adanya audit pekerjaan pada kegiatan kredit oleh auditor secara independen untuk lebih mendorong berjalannya pengendalian perkreditan pada unit kerja pengelola kredit. Perlu diperhatikan apakah auditee memperhatikan saran atau rekomendasi perbaikan yang disampaikan auditor.

Proses pengendalian kredit berjalan seiring dengan proses kredit itu sendiri, apabila proses pengendalian berjalan baik akan tercipta sistem peringatan dini sehingga gejala-gejala yang bisa menjerumuskan pada kejadian atau hal-hal yang tidak dikehendaki akan segera dideteksi. Jadi bejalan baiknya suatu sistem pengendalian kredit sangat menentukan keberhasilan manajemen perkreditan suatu bank.

2.2.4.2 Resiko dalam pengelolaan kredit¹⁴

Resiko finansial antara lain:

- 1) Tidak kembalinya kredit yang diberikan baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya karena kelalaian bank, itikad buruk nasabah, dan sebab-sebab di luar jangkauan seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam.

¹⁴ Tjukria P Tawaf, *Audit Intern Bank*, hal 269

- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh tidak ada kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu, dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga resiko kredit semakin besar.
- 4) Hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis, dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah.
- 5) Adanya penalty, denda, atau sanksi lainnya dari Bank Indonesia ataupun instansi yang berwenang karena ketidakpatuhan kepada peraturan yang berlaku.
- 6) Kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-akte pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh debitur, jaminan palsu atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur.
- 7) Kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari debitur, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit dapat diberikan.
- 8) Kerugian karena diubahnya atau tidak akuratnya informasi mengenai file kredit yang berhubungan dengan:
 - a. informasi debitur (nama, alamat, perusahaan atau badan usaha)
 - b. informasi mengenai sejarah kredit (jenis kredit yang diberikan, jaminan, pembayaran, jatuh tempo, skedul pembayaran dsb.)
- 9) Kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit dihapuskan.
- 10) Kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar.

2.3 Attribute Sampling

2.3.1 Pengertian

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan dalam auditnya, auditor tidak mengumpulkan semua bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan melakukan (*test*), terhadap karakteristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan karakteristik seluruh bukti¹⁵.

2.3.2 Tipe Pengambilan Sampel dalam Pemeriksaan Akuntansi

Ada 4 cara yang dapat ditempuh auditor dalam mengambil data pada proses pemeriksaan akuntasinya.

1. Sampel 100%.

Auditor dapat menggunakan semua atau 100% sample dalam auditnya, misalnya dengan memeriksa semua dokumen kredit yang mempunyai nominal diatas Rp400.000. Jika auditor menggunakan cara pemeriksaan ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur penting/ kunci (jumlah rupiah diatas Rp400.000 dianggap penting untuk diperiksa oleh auditor). Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kredit yang bernilai nominal diatas Rp400.000 tersebut bersifat konklusif. Untuk dokumen kredit yang bernilai Rp400.000 atau kurang, auditor tidak dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya.

2. *Judgement sample*

Dalam *Judgement sample* auditor memilih anggota sampel berdasarkan pertimbangannya. Misalnya auditor memilih bulan Januari sampai dengan Desember sebagai periode pengujian, dengan pertimbangan bulan-bulan tersebut

¹⁵ Mulyadi Drs. Akt. Msc. Auditing I ed 5, hal 251

transaksi yang bersangkutan dengan penjualan kredit sangat tinggi frekuensinya. Auditor memeriksa semua faktur penjualan yang dibuat dalam periode pengujian (*test period*) untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern terhadap transaksi penjualan. Dalam *Judgement sample* ini auditor memilih sampel berdasarkan pertimbangan auditor dan menganalisis hasil pemeriksaan sampel berdasarkan pertimbangan auditor. Pengambilan sampel ini tidak dapat dikatakan sebagai *Statistical sample* karena hasil evaluasi terhadap anggota sampel tidak dapat secara matematis diproyeksikan bagi anggota yang tidak diperiksa karena sampel yang diperiksa tidak mewakili anggota populasi secara keseluruhan.

3. *Representative sample*

Auditor dapat juga menggunakan *Representative sample* dalam proses pemeriksaannya yaitu dengan memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Dengan cara ini setiap anggota populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Namun karena evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel tidak dilakukan secara matematis maka *Representative sample* tidak dapat disebut sebagai *Statistical sample*.

4. *Statistical sample*

Proses audit menggunakan *Statistical sample* yaitu auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan metode ini jika terdapat dua orang atau lebih auditor menggunakan cara yang sama dalam pengambilan keputusan sampel dengan *Statistical sample* ini maka kemungkinan semua auditor tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang tidak berbeda secara

statistik. Dengan kata lain, *Statistical sample* akan menjamin objektivitas hasil evaluasi terhadap objek yang diperiksa. *Statistical sample* memiliki beberapa kelebihan antara lain¹⁶ :

1) Pengukuran temuan audit adalah obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, karena prinsip statistik yang mendasari perhitungan dapat diterima secara luas sehingga generalisasi mengenai populasi dapat dibuat.

2) Pertimbangan kecukupan sampel dapat ditentukan sebelum sampel dipilih.

3) Persyaratan keacakan atau kerandoman memaksakan sampel untuk memenuhi kriteria representatif sesuai yang dinyatakan dalam Standar Profesi Akuntan.

4) Kebutuhan untuk mendefinisikan atribut dan penyimpangan secara jelas menyebabkan kehati-hatian dan perhatian pada detail transaksi.

5) Sampel yang diambil oleh auditor yang bekerja pada lokasi yang berbeda, misal pada kantor cabang klien yang sama dapat digunakan untuk penilaian secara keseluruhan.

Ada dua hal yang menyebabkan sampel tidak representatif yaitu¹⁷ :

1) Kesalahan non sampel adalah pengujian audit tidak dapat menemukan penyimpangan yang ada disebabkan oleh auditor gagal dalam menemukan penyimpangan atau struktur pengendalian internnya tidak efektif.

2) Kesalahan sampel merupakan bagian yang melekat pada pengujian dibawah 100%.

¹⁶ Bambang Hartadi Drs Akt MM, Sistem Pengendalian Intern : Dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit ed 3, hal 230

¹⁷ Munawir H. S. Auditing Modern, hal 294

Walaupun resiko non sampel nol, masih ada kemungkinan sampel tidak representatif. Ada dua cara menurunkan resiko sampel yaitu dengan menambah jumlah sampel dan menggunakan probabilitas

Sampel statistik (*Statistical sample*) dibagi menjadi dua yaitu *attribute sampling* dan *variable sampling*. *Attribute sampling* atau disebut juga *proportional sampling* digunakan terutama untuk menguji efektivitas pengendalian intern (dalam pengujian pengendalian). *Variable sampling* digunakan untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam akun (dalam pengujian substantif).

2.3.3 *Attribute Sampling Models*

Ada tiga model *attribute sampling* yaitu :

1. *Fixed sample size attribute sampling*

Fixed sample size attribute sampling adalah model atau metode yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan akuntansi oleh auditor. Pengambilan sampel dengan metode ini ditujukan untuk memperkirakan prosentase terjadinya mutu tertentu dalam suatu proses populasi. Misalnya, dengan metode *Fixed sample size attribute sampling* auditor dapat memperkirakan berapa persen bukti kas keluar (kuitansi penerimaan uang) yang terdapat dalam populasi tidak dilampiri dengan bukti pendukung yang lengkap. Metode ini digunakan jika auditor melakukan pengujian pengendalian terhadap suatu unsur pengendalian intern, dan auditor tersebut memperkirakan akan menjumpai beberapa penyimpangan atau kesalahan.

2. *Stop or go sampling*

Metode pengambilan sampel ini sering disebut juga dengan *decision attribute sampling*. Metode ini dapat mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian secepat mungkin. Metode ini digunakan apabila auditor yakin perkiraan kesalahan sangat kecil.

3. *Discovery sampling*

Metode pengambilan sampel *discovery sampling* tepat digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah atau mendekati nol. Auditor menginginkan kemungkinan tertentu untuk menemukan paling tidak satu kesalahan jika kenyataan tingkat kesalahan sesungguhnya lebih besar dari yang diharapkan. *Discovery sampling* digunakan oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran yang serius dari unsur pengendalian intern dan ketidakberesan yang lain.

2.3.4 Prosedur Penggunaan *Fixed Sample Size Attribute Sampling*¹⁸

Penggunaan *sampling* dalam pengujian pengendalian terhadap prosedur pemberian kredit. Prosedur pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Penentuan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Penentuan *attribute* dilakukan oleh auditor dilakukan sebelum melakukan pengambilan sampel. *Attribute* adalah karakteristik yang bersifat kualitatif suatu unsur yang membedakan unsur tersebut dengan unsur yang lain. Dalam hubungannya dengan pengujian pengendalian, *attribute* adalah penyimpangan dari unsur tertentu dalam unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Sebagai contoh dalam sistem pemberian kredit, persetujuan

¹⁸ Mulyadi Drs Akt Msc, Auditing I ed 5, 1998. hal 254

pemberian kredit dari Bagian Kredit merupakan unsur pengendalian intern untuk mencegah terjadinya pemberian kredit yang memepertimbangkan kemungkinan pengembalian kredit tersebut. Pengujian pengendalian terhadap pemberian kredit tersebut, salah satu attribute yang akan dipriksa oleh auditor adalah tanda tangan persetujuan dari dari Kepala Bagian Kredit yang tertera pada Surat Permohonan Kredit.

2. Penentuan populasi yang akan diambil sampelnya.

Langkah berikutnya setelah menentukan attribute yang akan diuji yaitu menentukan populasi yang akan diambil sampelnya. Sampel pengujian pengendalian terhadap prosedur pemberian kredit adalah dokumen pemberian kredit yang meliputi Surat Permohonan Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan kuitansi penerimaan uang.

3. Penentuan besarnya sampel.

Untuk menentukan besarnya sampel yang akan diambil dari populasi tersebut secara statistik, maka auditor harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini :

1) Penentuan tingkat keandan (*reliability level*) atau *confidence level* atau disingkat R%. Tingkat keandalan adalah probabilitas benar dalam mempercayai efektivitas pengendalian intern. Sebagai contoh, jika auditor memilih R% = 95% berarti bahwa ia mempunyai resiko 5% untuk mempercayai suatu pengendalian intern yang sebenarnya tidak efektif. Dalam pengujian pengendalian, umumnya auditor menggunakan R%=90%, 95% atau 99%

2) Penaksiran persentase terjadinya attribute dalam populasi.

Penaksiran ini didasarkan pada pengalaman auditor di masa yang lalu atau dengan melakukan percobaan. Dalam hal auditor tidak mempunyai pengalaman mengenai besarnya tingkat kesalahan dalam populasi, ia dapat mengambil 100 lembar Surat Perjanjian Kredit untuk menaksir tingkat kesalahan dalam populasi. Misalnya dari pemeriksaan 100 lembar Surat Perjanjian Kredit tersebut dokumen yang tidak dilampiri dengan tanda tangan Kepala Bagian Kredit ada 1 dokumen maka taksiran tingkat kesalahan dalam populasi adalah sebesar 1 % (1/100).

3) Penentuan batas ketepatan atas yang diinginkan (*Desired Upper Precision Limit* atau DUPL). Penggunaan tabel penentuan besarnya sampel untuk menentukan besarnya sampel. Tabel penentuan besarnya sampel yang tersedia adalah disusun menurut R%. Ada tiga macam tabel untuk tiga tingkat keandalan yaitu : 90%, 95% dan 99%

4) Pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi.

Setelah ditentukan besarnya sampel sebanyak 100 lembar Surat Permohonan Kredit, Surat Perjanjian Kredit dan Kuitansi Penerimaan Uang, timbul masalah mengenai bagaimana menyeleksi 100 lembar dari 2000 lembar dokumen Kredit. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel, maka auditor dapat menggunakan angka acak.

4. Pemeriksaan terhadap *attribute* yang akan menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. Seratus lembar Surat perjanjian kredit surat yang memiliki nomor-nomor sesuai dengan angka acak yang dipilih dari tabel angka acak tersebut diambil dari arsip, langkah berikutnya adalah memeriksa *attribute* berupa

tandatangan Kepala Bagian Kredit yang dilampiri dengan dokumen pendukung fotokopi identitas nasabah tersebut. Jika terdapat Surat Permohonan Kredit yang tidak ditandatangani oleh Kepala Bagian Kredit, maka hal ini merupakan penyimpangan dari unsur pengendalian intern yang seharusnya ada. Auditor harus mencatat hasil temuan untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap *attribute* anggota sampel.

Pemeriksaan terhadap 100 Surat permohonan Kredit tersebut auditor menemukan 1 lembar Surat permohonan Kredit tidak dilampiri dengan tandatanga oleh Kepala Bagian Kredit, maka auditor tersebut kemudian menggunakan tabel evaluasi hasil yang memiliki tingkat keandalan sesuai yang digunakan untuk menentukan besarnya sampel yang lalu. Dengan tabel tersebut auditor dapat menemukan berapa *Achieved Upper Precision Limit* (AUPL).